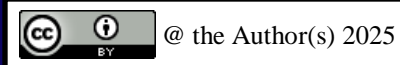




Nivedana

Jurnal Komunikasi dan Bahasa

E-ISSN: 2723-7664



@ the Author(s) 2025

Volume 6 Number 2, April-June 2025

Submitted 06 March 2025

Revised 15 May 2025

Accepted 12 June 2025

DOI : 10.53565/nivedana.v6i2.1704

MEDIA SOSIAL DAN GLOBALISASI INFORMASI: STUDI KASUS PERINGATAN DARURAT GARUDA BIRU OLEH NAJWA SHIHAB

Riyadi¹, Syamsuddin Aziz¹, Marsuki¹

Universitas Hasanuddin, Makassar

*Corresponding Author: riyadi.simon@gmail.com

Abstract

This study analyzes the impact of Najwa Shihab's "Peringatan Darurat Garuda Biru" post on public opinion, political discourse, and government policies in Indonesia following the 2024 elections. Focusing on criticisms of political dynasties and the dominance of mainstream media narratives, the study demonstrates how social media can serve as a critical tool in promoting transparency, accountability, and active citizen participation in democracy. Using a qualitative literature review approach, the study finds that the post effectively mobilized large-scale public opinion, creating significant pressure on the government to act with greater transparency and accountability. Furthermore, the post successfully broadened critical discussions within society. However, its long-term effectiveness is hindered by opinion polarization and the influence of digital media algorithms. These findings offer practical benefits by highlighting the importance of combining digital mobilization with tangible actions to enhance democratic quality. The study also raises awareness about challenges in digital public spaces, enabling citizens to approach digital information more critically and thoughtfully.

Keywords: *Najwa Shihab, social media, public opinion, political dynasty, Garuda Biru*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak unggahan Peringatan Darurat Garuda Biru oleh Najwa Shihab terhadap opini publik, wacana politik, dan kebijakan pemerintah di Indonesia pasca Pemilu 2024. Berfokus pada kritik terhadap dinasti politik dan dominasi narasi media arus utama, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, ditemukan bahwa unggahan tersebut mampu secara efektif memobilisasi opini publik dalam jumlah besar dan menciptakan tekanan signifikan terhadap pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, unggahan tersebut berhasil memperluas diskusi kritis di masyarakat. Namun, efektivitas jangka panjangnya terhambat oleh polarisasi opini dan pengaruh algoritma media digital. Temuan ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami pentingnya kombinasi antara mobilisasi digital dengan aksi nyata guna meningkatkan kualitas demokrasi. Studi ini juga memberikan kesadaran akan tantangan ruang publik digital, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan bijak dalam menyikapi informasi digital. Kata Kunci: *Najwa Shihab, media sosial, opini publik, dinasti politik, Garuda Biru*

¹ Universitas Hasanuddin, Makassar, email: riyadi.simon@gmail.com

² Universitas Hasanuddin, Makassar, email: syamsuddinaziz@unhas.ac.id

³ Universitas Hasanuddin, Makassar, email: marsemil@yahoo.fr

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

PENDAHULUAN

Najwa Shihab telah lama menjadi tokoh sentral dalam dunia jurnalisme Indonesia. Ia diakui karena kemampuannya mengajukan pertanyaan tajam dan kritis dalam wawancara-wawancara yang mengungkap sisi tersembunyi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Gaya komunikasinya yang tegas namun elegan serta keberaniannya dalam menantang narasi arus utama menjadikannya ikon dalam jurnalisme independen. Pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2024, perannya dalam membentuk opini publik dan menjaga akuntabilitas politik semakin krusial, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang netral dan kredibel di tengah polarisasi politik yang intens. Salah satu momen signifikan yang mempertegas pengaruh besar Najwa Shihab dalam lanskap jurnalisme dan opini publik di Indonesia adalah unggahan Peringatan Darurat berlatar Garuda Biru yang dipublikasikan melalui Instagram pada 21 Agustus 2024. Unggahan tersebut tidak hanya menjadi wujud keprihatinannya terhadap situasi politik dan ekonomi yang berkembang pasca pemilu, tetapi juga sebuah seruan terbuka yang menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih kritis terhadap dinamika kekuasaan. Dalam waktu singkat, unggahan ini berhasil menarik perhatian luar biasa dengan lebih dari 4 juta likes, 120 ribu komentar, dan 683 ribu shares hingga 12 September 2024. Angka ini mencerminkan daya jangkauan dan daya tarik unggahan tersebut, yang tidak hanya berhasil menginspirasi diskusi luas di platform digital tetapi juga menjadi topik pembicaraan di berbagai media arus utama.

Reaksi masif terhadap unggahan ini menyoroti pentingnya peran media sosial sebagai medium penyebaran pesan kritis di era digital. Lebih dari sekadar platform untuk berbagi informasi, media sosial telah menjadi alat strategis untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan akan narasi yang jujur dan kredibel di tengah polarisasi politik (Han, 2024). Studi (Halpern & Gibbs, 2013; Parmelee & Bichard, 2011; Fischer & Reuber, 2011; Tucker, et.al, 2018) menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang berinteraksi dengan unggahan politik tersebut merasa termotivasi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang isu yang diangkat, sementara lainnya mengakui bahwa unggahan di media sosial memengaruhi cara pandang mereka terhadap situasi politik terkini. Lebih jauh, respons publik terhadap *Peringatan Darurat* juga menegaskan posisi Najwa Shihab sebagai salah satu figur yang mampu menjembatani jurnalisme tradisional dengan pendekatan digital. Unggahan ini membuktikan bagaimana seorang jurnalis dapat memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan pesan yang bukan hanya informatif, tetapi juga menggugah kesadaran kolektif. Dengan memanfaatkan kekuatan visual yang kuat, seperti simbol *Garuda Biru*, dan narasi yang emosional namun berbasis data, Najwa tidak hanya menggerakkan opini publik, tetapi juga memobilisasi tindakan nyata dalam menuntut perubahan sosial dan politik.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Relevansi unggahan ini dalam dinamika pasca pemilu mencerminkan bagaimana Najwa Shihab telah berhasil menjadikan media sosial sebagai alat advokasi yang efektif. Dalam konteks ini, *Peringatan Darurat* bukan hanya sebuah unggahan; melainkan sebuah momen transformatif yang menggarisbawahi pentingnya peran individu dalam membentuk dialog publik yang lebih sehat dan bertanggung jawab di tengah tantangan demokrasi modern.

Peristiwa ini, jika dilihat dari konteks ekonomi politik media, mencerminkan bagaimana figur independen seperti Najwa Shihab mampu menjadi kekuatan signifikan untuk mendobrak hegemoni media yang terafiliasi dengan kepentingan politik dan bisnis. Herman dan Chomsky dalam *Manufacturing Consent* (1988) mengemukakan bahwa media sering kali bertindak sebagai alat propaganda yang melayani kepentingan elit, baik itu pemerintah maupun korporasi. Dalam konteks Indonesia, Tapsell melalui *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital* (2019) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan media yang terpusat menjadi tantangan besar bagi kebebasan pers, di mana narasi yang mendukung penguasa lebih sering mendominasi ruang publik. Hal ini menunjukkan bagaimana media arus utama sering kali kehilangan independensinya karena beroperasi dalam kerangka yang melayani pemilik modal atau aktor politik tertentu.

Pendekatan ekonomi politik media yang diusung oleh Bagdikian (2004) dan Tapsell (2019) memperlihatkan bahwa kepemilikan media tidak hanya memengaruhi kebijakan editorial, tetapi juga menentukan agenda berita yang ditampilkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, berita yang berlawanan dengan kepentingan pemilik media sering kali tersisih, menciptakan apa yang disebut oleh Chomsky sebagai *filter informasi*. Hal ini menjelaskan mengapa isu-isu kritis yang dapat merugikan oligarki jarang muncul di permukaan melalui media arus utama. Namun, fenomena seperti *Peringatan Darurat* yang diunggah oleh Najwa Shihab menunjukkan dinamika baru dalam lanskap media di era digital. Sebagai figur independen, Najwa mampu memanfaatkan platform seperti Instagram untuk menciptakan wacana alternatif yang tidak hanya relevan tetapi juga memiliki daya tarik emosional dan intelektual bagi audiensnya. Unggahan ini mencerminkan bagaimana individu dengan kredibilitas tinggi dan penguasaan media digital dapat menggeser dominasi media arus utama. Dalam kerangka teori ekonomi politik media, fenomena ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan informasi, di mana platform digital memungkinkan suara independen untuk bersaing dengan narasi besar yang didukung oleh oligarki media.

Transformasi distribusi kekuasaan informasi ini sejalan dengan pandangan McChesney (2008), yang menyoroti bahwa internet dan media digital dapat menjadi alat untuk mendemokratisasi informasi, meskipun tantangan seperti algoritma platform dan *monetization bias* tetap ada. Dalam kasus *Peringatan Darurat*, Najwa Shihab menggunakan simbol kuat seperti *Garuda Biru* untuk memperkuat pesan keprihatinan terhadap situasi politik dan ekonomi pasca pemilu, sehingga menciptakan resonansi yang mendalam dengan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

audiensnya. Dengan lebih dari 4 juta likes dan ratusan ribu interaksi lainnya, unggahan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga platform advokasi dan mobilisasi massa yang efektif.

Fenomena ini menggarisbawahi bagaimana media independen dan digital mampu membangun ruang diskusi alternatif di tengah monopoli narasi oleh media konvensional. Dalam perspektif ekonomi politik media, ini adalah langkah penting menuju distribusi kekuasaan yang lebih merata, di mana akses terhadap informasi tidak lagi dimonopoli oleh segelintir elit. Transformasi ini, meskipun belum sempurna, memberikan harapan bahwa kontrol atas wacana publik dapat kembali ke tangan masyarakat, didorong oleh aktor-aktor independen seperti Najwa Shihab yang mampu memanfaatkan potensi penuh era digital untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, dominasi media oleh elit politik dan ekonomi tidak sepenuhnya menghilangkan ruang bagi elemen-elemen *civil society* untuk berperan dalam membangun wacana alternatif. Elemen *civil society* yang independen mampu menjadi kekuatan tandingan yang efektif dalam menghadapi hegemoni narasi yang dikendalikan oleh kepentingan oligarki. Sebagai contoh, gerakan *Arab Spring* pada awal dekade 2010-an menunjukkan bagaimana masyarakat sipil menggunakan media sosial untuk menantang rezim otoriter yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan. Media sosial dalam kasus ini berfungsi sebagai alat untuk mobilisasi publik, memperluas jaringan solidaritas, dan menciptakan tekanan terhadap kekuasaan (Umar, et.al, 2014).

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini memiliki relevansi yang berbeda namun tetap signifikan. Penggunaan media digital oleh Najwa Shihab mencerminkan bagaimana individu berpengaruh dapat menggunakan platform digital untuk menciptakan perubahan sosial melalui narasi yang kuat dan berbasis data. Sebagaimana dalam gerakan *Arab Spring*, media sosial menjadi alat untuk memobilisasi perhatian publik terhadap isu-isu kritis. Namun, alih-alih berfokus pada penggulingan rezim otoriter, penggunaan media digital oleh figur seperti Najwa bertujuan untuk menantang bias dan ketidakadilan sistemik yang sering kali disembunyikan di balik retorika media arus utama. Sebagaimana dicatat oleh Atkinson (2010), media independen memberikan ruang bagi narasi yang sering kali ditekan atau diabaikan oleh media arus utama. Dalam kasus unggahan *Peringatan Darurat* oleh Najwa Shihab, respons publik yang masif menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bias media dan kebutuhan akan informasi yang lebih transparan dan kredibel. Dengan lebih dari 4 juta likes, 120 ribu komentar, dan 683 ribu shares, unggahan ini menjadi bukti bahwa masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengungkap ketidakpuasan mereka terhadap narasi yang dikendalikan oleh elit.

Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai ruang demokrasi baru, di mana kekuasaan narasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi media mainstream yang sering terafiliasi dengan kepentingan politik dan bisnis. Platform digital seperti Instagram memberikan alat yang memungkinkan individu dan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

kelompok *civil society* untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten yang dapat menantang status quo. Ini sejalan dengan pandangan Habermas dan Press (1989) tentang ruang publik, di mana media sosial menciptakan arena diskusi baru yang lebih inklusif dibandingkan dengan ruang publik tradisional yang sering kali dibatasi oleh hierarki kekuasaan. Najwa Shihab sebagai bagian dari *civil society* modern menunjukkan bagaimana individu yang kredibel dapat memanfaatkan kekuatan media baru untuk menggerakkan wacana publik. Respons masif terhadap unggahannya mengindikasikan bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta sebagai platform untuk mendistribusikan narasi-narasi alternatif yang sering kali ditekan oleh media arus utama.

Namun, kekuatan media baru ini juga menghadapi tantangan. Seperti dicatat oleh McChesney (2015), algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten yang bersifat sensasional atau emosional, yang dapat memengaruhi kualitas diskusi publik dengan mengesampingkan narasi berbasis fakta atau analisis mendalam. Selain itu, disinformasi dan manipulasi opini publik juga menjadi ancaman serius dalam era media digital di mana penyebaran informasi palsu dapat terjadi dengan cepat dan memperburuk polarisasi sosial. Oleh karena itu, peran individu dan *civil society* yang independen menjadi semakin krusial dalam menjaga integritas ruang publik digital di tengah tantangan disinformasi dan dominasi narasi elit. Fenomena seperti unggahan *Peringatan Darurat* oleh Najwa Shihab menunjukkan bagaimana *civil society* dapat secara efektif memanfaatkan media baru untuk menantang hegemoni informasi yang terpusat dan memperluas jangkauan wacana alternatif. Dalam konteks Indonesia, media sosial bertransformasi menjadi alat strategis bagi individu dan kelompok independen untuk mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif. Selain itu, platform digital ini memperkuat demokrasi dengan menciptakan ruang yang memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan keberagaman suara di ruang publik, sehingga membuka peluang bagi diskusi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Studi-studi sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh McChesney, R. W. (2015), Baker (2006), Tapsell (2019), Bagdikian (2004), dan Hardy (2014) telah memberikan perhatian besar pada dominasi konglomerasi media di Indonesia, yang sering kali dimanfaatkan untuk melayani kepentingan elit politik dan ekonomi. Temuan-temuan ini menyoroti bagaimana struktur kepemilikan media yang terpusat dapat membatasi keberagaman perspektif, memprioritaskan narasi yang menguntungkan pemilik modal, dan mengabaikan isu-isu yang relevan bagi masyarakat luas. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur terkait peran media independen dan figur seperti Najwa Shihab yang memanfaatkan platform digital untuk menantang dominasi tersebut. Kajian terhadap media independen seperti Narasi dan kontribusi figur independen dalam membangun narasi tandingan memiliki potensi besar

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

untuk memperluas pemahaman tentang dinamika kekuasaan informasi di era digital. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada konglomerasi media, tetapi jarang menggali lebih dalam bagaimana media digital dapat menjadi alat resistensi terhadap hegemoni. Selain itu, keterbatasan penelitian juga terlihat dalam kurangnya analisis yang sistematis mengenai dampak figur independen seperti Najwa Shihab dalam menggerakkan opini publik, menciptakan ruang diskusi alternatif, dan bahkan mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini relevan dalam mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana media digital digunakan oleh figur independen untuk melawan narasi dominan. Dengan menyoroti kontribusi Najwa Shihab, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru tentang peran media independen, tetapi juga memperkuat argumen bahwa media digital telah mentransformasi lanskap kekuasaan informasi, memungkinkan *civil society* dan aktor independen untuk memengaruhi diskursus publik secara lebih luas. Dengan demikian, studi ini akan memperkaya literatur tentang ekonomi politik media, memperdalam pemahaman tentang dinamika media di era digital, dan memberikan wawasan baru tentang strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas melalui media.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang strategi komunikasi Najwa Shihab dalam memanfaatkan media digital, khususnya melalui unggahan *Peringatan Darurat Garuda Biru*, untuk menantang dominasi narasi yang dikendalikan oleh media arus utama; mengidentifikasi dampak unggahan *Peringatan Darurat Garuda Biru* terhadap opini publik dan respons kebijakan pemerintah pasca Pemilihan Presiden 2024, dalam konteks ekonomi politik media di Indonesia; mengeksplorasi reaksi masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui unggahan tersebut, termasuk bagaimana hal ini mencerminkan perubahan perilaku konsumsi informasi di era media digital dan penguatan peran *civil society* dalam membentuk wacana publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis fenomena unggahan *Peringatan Darurat Garuda Biru* oleh Najwa Shihab dalam menciptakan opini publik, memobilisasi diskusi, dan mendorong transparansi dalam diskursus politik. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam menggali data, konsep, dan teori yang mendalam melalui sumber-sumber tertulis tanpa melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam dan menganalisisnya berdasarkan teori yang relevan. Fokusnya adalah menjelaskan konteks unggahan, mekanisme penyebaran pesan, dan dampaknya terhadap opini publik serta wacana politik. Data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber-sumber

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

sekunder yang relevan dan kredibel, meliputi: buku, artikel ilmiah, artikel media online dan dokumentasi digital. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui buku, jurnal, artikel, dan publikasi digital. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan teori yang digunakan dalam penelitian, seperti teori ekonomi politik media, ruang publik, opini publik, dan mobilisasi sosial. Analisis terhadap data interaksi pada unggahan *Peringatan Darurat Garuda Biru* dilakukan dengan mengacu pada laporan statistik platform media sosial yang tersedia di sumber terpercaya, seperti data yang dilaporkan oleh media atau artikel jurnal.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari literatur dan dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah: Kategorisasi Informasi, Analisis Tematik dan Triangulasi Teoritis. Metode penelitian kepustakaan ini terbatas pada data sekunder yang tersedia, sehingga tidak mencakup wawasan dari narasumber langsung atau data primer lainnya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data statistik detail pada unggahan di media sosial menjadi salah satu tantangan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan memastikan bahwa semua sumber yang digunakan telah diakui kredibilitasnya dan dicantumkan sesuai dengan standar akademik. Interpretasi data dilakukan secara obyektif untuk menghindari bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa unggahan Peringatan Darurat Garuda Biru oleh Najwa Shihab muncul sebagai respons terhadap dinamika politik pasca-Pilpres 2024, dengan isu sentral pencalonan Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur. Keputusan Mahkamah Agung untuk mengubah interpretasi batas usia minimal mencerminkan kompleksitas hukum yang dapat memengaruhi legitimasi politik. Unggahan ini tidak hanya menyoroti isu hukum, tetapi juga mengangkat kritik terhadap dinasti politik dan perlunya transparansi dalam pengambilan keputusan politik (Liputan6, 2024).



Gambar 1. Peringatan Darurat Garuda Biru

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Makna Simbol Peringatan Darurat Garuda Biru

Simbol Peringatan Darurat Garuda Biru yang diangkat oleh Najwa Shihab memiliki makna yang mendalam dan berlapis, dirancang untuk menyampaikan pesan kritis terhadap situasi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024. Simbol ini menggabungkan elemen-elemen nasionalisme, keadilan, dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui dua elemen utama: Garuda sebagai lambang negara dan warna biru yang sarat akan konotasi nilai-nilai tertentu. Berikut adalah analisis lengkap dari makna simbol ini (Kompas, 2024):

a) Garuda sebagai Representasi Nasionalisme dan Kedaulatan

Garuda adalah lambang negara Indonesia yang diambil dari mitologi Hindu dan Buddha. Dalam konteks Peringatan Darurat Garuda Biru, simbol Garuda membawa pesan nasionalisme yang kuat, mengingatkan pada pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Dalam hal ini, Najwa Shihab menggunakan Garuda untuk menyiratkan bahwa kepemimpinan dan politik Indonesia harus tetap berakar pada prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan kepentingan nasional, bukan pada kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau dinasti. Garuda juga melambangkan kekuatan dan keberanian, mengingatkan masyarakat akan pentingnya peran rakyat dalam memantau dan mempertahankan keutuhan demokrasi. Pilihan ini menekankan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya simbolis tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

b) Warna Biru sebagai Simbol Kepercayaan dan Keadilan

Warna biru dalam simbol ini memberikan makna tambahan yang signifikan. Dalam budaya politik dan psikologi warna, biru sering diasosiasikan dengan kepercayaan, kestabilan, dan keadilan. Dengan memasukkan warna biru ke dalam simbol Garuda, Najwa Shihab menyiratkan pentingnya menghadirkan pemerintahan yang dapat dipercaya, adil, dan berkomitmen pada nilai-nilai transparansi. Warna biru juga membawa konotasi ketenangan dan ketegasan. Dalam situasi politik yang penuh polarisasi dan ketidakpastian, simbol ini mengundang masyarakat untuk merenungkan kebutuhan akan kepemimpinan yang bijaksana, stabil, dan fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.

c) Peringatan Darurat: Konteks Krisis Demokrasi

Penambahan "peringatan darurat" dalam simbol ini memperkuat pesan bahwa bangsa Indonesia sedang berada dalam situasi krisis, terutama terkait praktik dinasti politik dan lemahnya akuntabilitas pemimpin. Pesan ini menyoroti bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah erosi nilai-nilai demokrasi dan transparansi. Ungkapan ini juga berfungsi sebagai ajakan bagi publik untuk lebih kritis terhadap dinamika politik, seperti keputusan Mahkamah Agung yang memungkinkan pencalonan Kaesang Pangarep. Simbol ini secara implisit memperingatkan bahwa pelanggaran atau manipulasi terhadap hukum demi kepentingan tertentu dapat mengancam prinsip meritokrasi dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Konteks Ekonomi Politik Media

Dalam konteks ekonomi politik media, penelitian ini menemukan bahwa unggahan Najwa Shihab menjadi bentuk perlawanan terhadap kecenderungan media arus utama yang sering mengabaikan narasi kritis. Media sosial digunakan sebagai ruang publik alternatif untuk memobilisasi perhatian publik terhadap isu-isu seperti polarisasi politik, dinasti politik, dan demokrasi sehat. Pesan ini dirancang untuk menjangkau audiens yang luas, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil, yang berkontribusi pada peningkatan diskusi publik tentang kepemimpinan berbasis meritokrasi. Selain itu, unggahan ini mencerminkan keberanian dalam menyuarakan kritik terhadap dominasi kekuasaan yang berbasis hubungan keluarga. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan-temuan terdahulu yang menyoroti peran media digital dalam menciptakan narasi alternatif. Misalnya, Curran dan Seaton (2018) mengemukakan bahwa media digital memiliki potensi untuk menantang dominasi media arus utama. Dalam kasus unggahan Najwa Shihab, narasi alternatif tersebut tidak hanya berhasil memperluas diskusi publik tetapi juga memberikan kritik simbolik terhadap dinasti politik. Hal ini sejalan dengan gagasan Habermas (1989) tentang ruang publik, di mana media sosial berfungsi sebagai arena untuk mendiskusikan isu-isu politik secara bebas dan kritis.

Namun, berbeda dari penelitian McNair (2017) yang menunjukkan bahwa media sering kali digunakan sebagai alat propaganda oleh elit, unggahan ini menampilkan bagaimana figur publik seperti Najwa Shihab dapat membalikkan peran media untuk melawan narasi dominan. Dengan memanfaatkan simbolisme Garuda Biru, Najwa Shihab mampu menghadirkan kritik politik yang kuat, menggabungkan elemen nasionalisme dan keadilan. Analisis ini memperkaya diskusi akademis tentang bagaimana simbol nasionalisme dapat diarahkan untuk mendorong transparansi, sebagaimana dibahas dalam kajian Anderson (1991) tentang imajinasi komunitas. Lebih jauh, unggahan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian tentang dinasti politik di Indonesia, melengkapi temuan Telaumbanua (2024) yang menunjukkan bahwa dinasti politik sering kali melemahkan kualitas demokrasi. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang digital yang independen, Najwa Shihab berhasil memobilisasi perhatian masyarakat untuk mempertanyakan legitimasi pencalonan politik berbasis hubungan keluarga. Hal ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana media digital dapat digunakan untuk memperkuat peran publik dalam mengawasi pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini menyoroti keberanian Najwa Shihab dalam menyuarakan kritik terhadap isu-isu yang sering kali diabaikan oleh media arus utama. Dengan menantang narasi dominan, unggahan ini mengingatkan bahwa politik harus tetap berbasis meritokrasi, bukan sekadar perpanjangan kekuasaan melalui hubungan keluarga. Temuan ini relevan dengan konsep Castells (2015) tentang kekuatan jaringan, di mana media digital menjadi alat mobilisasi sosial yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial dan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa simbolisme dan platform digital memiliki peran penting dalam menyuarakan kritik politik yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

ini memperluas pemahaman tentang bagaimana figur publik dapat menggunakan media sosial untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan, sekaligus menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut tentang ekonomi politik media di era digital.

Dampak terhadap Kebijakan Pemerintah Pasca Pemilu: Analisis Deskriptif Kualitatif dalam Konteks Batalnya Pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Gubernur

Unggahan Peringatan Darurat Garuda Biru oleh Najwa Shihab menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik, mendorong respons pemerintah, dan memengaruhi wacana politik. Dalam konteks batalnya pencalonan Kaesang Pangarep sebagai gubernur, dampak ini menjadi semakin relevan karena menyoroti pentingnya meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses politik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa publik semakin sadar akan risiko dinasti politik dan mulai mengkritisi praktik-praktik yang dianggap mengancam prinsip demokrasi. Kesadaran ini tercermin dalam diskusi intensif di media sosial dan media arus utama yang berfokus pada pentingnya penegakan aturan tanpa intervensi politik. Dari sisi pemerintah, respons terhadap tekanan publik terlihat dalam keputusan untuk tidak melanjutkan pencalonan Kaesang Pangarep. Meskipun Mahkamah Konstitusi sempat memberikan keputusan yang memungkinkan pencalonan Kaesang, tekanan sosial yang dipicu oleh unggahan Najwa Shihab tampaknya memengaruhi perubahan sikap pemerintah untuk menegakkan aturan secara konsisten. Keputusan ini mencerminkan adanya hubungan antara opini publik yang dimobilisasi melalui media sosial dan proses pengambilan keputusan di tingkat politik.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa batalnya pencalonan Kaesang memperkaya wacana politik terkait dinasti politik, transparansi, dan akuntabilitas. Diskusi yang meluas menunjukkan bahwa publik tidak hanya menyadari pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mulai berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi dinamika politik. Dengan demikian, peristiwa ini menunjukkan dampak signifikan dari partisipasi masyarakat dalam memperkuat demokrasi. Dampak unggahan Peringatan Darurat Garuda Biru dapat dianalisis lebih dalam dengan mengaitkan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan berbobot. Temuan ini sejalan dengan teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas (1989), di mana media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan diskusi kritis dan bebas tentang isu-isu penting. Dalam konteks ini, unggahan Najwa Shihab berhasil menciptakan ruang diskusi yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap praktik dinasti politik.

Penelitian ini juga mendukung temuan Castells (2015) tentang peran media sosial dalam memobilisasi opini publik. Castells (2015) menegaskan bahwa media digital memiliki potensi besar untuk menjadi alat mobilisasi sosial dan kritik politik, terutama dalam konteks di mana media arus utama cenderung bias atau

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

terkooptasi oleh elit politik. Dalam kasus ini, unggahan Najwa Shihab menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menciptakan tekanan sosial yang cukup kuat untuk memengaruhi keputusan politik, seperti batalnya pencalonan Kaesang Pangarep. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan perbedaan dengan temuan McNair (2017), yang menunjukkan bahwa media sering kali hanya berfungsi sebagai alat propaganda politik elit. Dalam kasus ini, media sosial justru berfungsi sebagai alat bagi masyarakat sipil untuk menantang dominasi elit dan menuntut akuntabilitas. Diskusi publik yang meluas setelah batalnya pencalonan Kaesang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk memengaruhi dinamika politik melalui media sosial.

Dalam konteks lokal, penelitian ini melengkapi kajian Telaumbanua (2024) tentang dampak dinasti politik terhadap demokrasi di Indonesia. Telaumbanua menyatakan bahwa dinasti politik sering kali melemahkan kualitas demokrasi karena cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran publik yang dipicu oleh unggahan Najwa Shihab dapat menjadi langkah awal untuk menentang praktik semacam itu dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, simbolisme unggahan Najwa Shihab, terutama dalam konteks Peringatan Darurat Garuda Biru, mengingatkan pada temuan Anderson (1991) tentang pentingnya simbol dalam membangun narasi nasionalisme dan kritik politik. Simbolisme ini tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi dan melawan praktik-praktik politik yang merusak.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa dampak unggahan Peringatan Darurat Garuda Biru bukan hanya bersifat simbolik tetapi juga memiliki efek nyata dalam menciptakan perubahan dalam dinamika politik. Dengan menghubungkan temuan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu, terlihat bahwa media sosial kini memiliki peran penting dalam memobilisasi masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa ruang publik digital dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat demokrasi, memastikan bahwa proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan bebas dari pengaruh nepotisme.

Reaksi Masyarakat terhadap Pesan-Pesan dalam Unggahan *Peringatan Darurat Garuda Biru*

Unggahan Peringatan Darurat Garuda Biru oleh Najwa Shihab menjadi katalisator berbagai reaksi masyarakat yang terangkum dalam tiga dimensi utama: partisipasi digital, persepsi dan sentimen publik, serta pengaruh terhadap tindakan kolektif. Respons luar biasa ini tercermin dari interaksi tinggi di media sosial, dengan jutaan likes, ratusan ribu komentar, dan berbagi unggahan yang masif. Partisipasi komunitas digital melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis, hingga generasi muda. Interaksi ini tidak hanya menjadi indikator perhatian publik terhadap isu yang diangkat tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan unggahan ini sebagai sarana untuk membangun wacana kritis terhadap

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

isu dinasti politik. Melalui analisis sentimen, ditemukan bahwa mayoritas reaksi publik bersifat positif, mengapresiasi keberanian Najwa Shihab dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan. Symbolisme Garuda Biru berhasil memicu rasa nasionalisme dan kesadaran kolektif tentang pentingnya demokrasi yang sehat. Namun, terdapat pula sentimen skeptis dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan efektivitas media sosial dalam mendorong perubahan nyata. Skeptisisme ini mencerminkan keraguan publik terhadap dampak konkret media sosial terhadap kebijakan pemerintah, meskipun unggahan ini telah menciptakan gelombang diskusi yang signifikan.

Dampak unggahan ini tidak hanya terbatas pada ranah digital, tetapi juga memicu tindakan kolektif di ruang fisik. Kampanye digital dengan tagar viral seperti #GarudaBiru menciptakan momentum yang mendorong diskusi lebih luas, baik di media sosial maupun media arus utama. Bahkan, petisi daring dan diskusi komunitas yang menuntut transparansi pemerintah menunjukkan bahwa pesan unggahan ini mampu memobilisasi masyarakat untuk mengambil langkah konkret. Dengan demikian, unggahan ini membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi alat mobilisasi yang efektif ketika didukung oleh narasi yang kuat dan figur independen yang kredibel. Reaksi masyarakat terhadap unggahan ini menggarisbawahi peran media sosial sebagai ruang publik digital yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan opini tanpa hambatan hierarki. Hal ini sejalan dengan teori ruang publik Habermas (1989), di mana media sosial memberikan akses yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik. Namun, fenomena ini juga memunculkan tantangan, seperti potensi polarisasi opini dan pengaruh algoritma yang dapat membatasi keragaman pandangan. Dalam konteks unggahan ini, interaksi yang luas menunjukkan bahwa media sosial berhasil menjadi ruang diskusi yang inklusif, meskipun kualitas diskusinya masih dapat dipengaruhi oleh fragmentasi audiens dan bias platform digital.

Mobilisasi opini publik yang dihasilkan oleh unggahan ini mencerminkan kekuatan media digital dalam membangun solidaritas kolektif. Seperti yang dikemukakan oleh Chadwick (2017), media sosial mampu berfungsi sebagai alat mobilisasi yang efektif, terutama ketika narasi yang dibangun bersumber dari figur independen yang kredibel. Najwa Shihab, melalui unggahan ini, berhasil membangun wacana kritis yang memperkuat kesadaran publik tentang isu dinasti politik dan pentingnya transparansi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dampaknya, diperlukan integrasi antara mobilisasi digital dengan tindakan nyata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat masyarakat sipil maupun pemerintah. Di sisi lain, skeptisisme terhadap efektivitas media sosial tetap menjadi isu yang relevan dalam konteks ini. Seperti yang disoroti oleh Lim (2018), dampak media sosial sering kali bersifat sementara dan tidak selalu menghasilkan perubahan struktural. Dalam kasus ini, meskipun unggahan tersebut berhasil menciptakan diskusi luas, dampaknya terhadap kebijakan pemerintah masih perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah diskusi ini akan memengaruhi kebijakan atau hanya berakhir sebagai wacana publik adalah pertanyaan yang

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

memerlukan penelitian lebih mendalam. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap Peringatan Darurat Garuda Biru menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun wacana kritis dan memobilisasi opini publik. Partisipasi digital yang masif, persepsi positif, dan tindakan kolektif yang muncul menegaskan bahwa pesan yang disampaikan Najwa Shihab berhasil menciptakan dampak yang signifikan. Namun, efektivitas jangka panjangnya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan seperti polarisasi opini dan memastikan bahwa mobilisasi digital dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang mendorong perubahan sosial dan politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya figur independen dalam menciptakan wacana kritis yang memperkuat demokrasi di era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa unggahan *Peringatan Darurat Garuda Biru* oleh Najwa Shihab memberikan dampak signifikan dalam membangun diskusi publik dan memobilisasi opini masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024. Unggahan tersebut berhasil menarik perhatian luas masyarakat melalui simbolisme yang kuat dan pesan yang relevan dengan situasi politik dan ekonomi saat itu. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang publik digital, Najwa Shihab menciptakan narasi alternatif yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kewaspadaan terhadap potensi dinasti politik, yang sebelumnya kurang mendapatkan sorotan di media arus utama. Reaksi masyarakat terhadap unggahan ini mencerminkan keterlibatan aktif dalam diskusi digital. Tingginya jumlah interaksi, seperti *likes*, *shares*, dan komentar, menunjukkan bahwa masyarakat merespons secara emosional dan intelektual terhadap isu-isu yang diangkat. Banyak dari mereka mendukung pesan transparansi dan kritik terhadap dinamika politik pasca pemilu. Selain itu, unggahan ini memicu berbagai kampanye digital, seperti tagar yang menjadi viral dan diskusi komunitas daring maupun luring. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang inklusif untuk menyuarakan opini, memobilisasi solidaritas, dan memperluas jangkauan wacana politik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun media sosial efektif dalam menciptakan momentum mobilisasi opini publik, dampaknya terhadap kebijakan pemerintah tidak selalu langsung dan memerlukan integrasi dengan tindakan nyata. Respons pemerintah terhadap tekanan publik yang dimobilisasi melalui unggahan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas menuju kebijakan yang lebih transparan, meskipun tidak secara eksplisit mengakui pengaruh dari media sosial. Selain itu, tantangan seperti polarisasi opini, disinformasi, dan ketergantungan pada algoritma platform digital tetap menjadi hambatan dalam memastikan keberlanjutan pengaruh dari mobilisasi ini.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah lebih responsif terhadap opini publik yang dimobilisasi melalui media sosial dengan mengintegrasikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Aktivis dan masyarakat sipil juga diharapkan dapat memanfaatkan momentum

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

diskusi digital ini untuk mendorong tindakan kolektif yang lebih konkret dalam mengadvokasi perubahan kebijakan. Selain itu, figur publik seperti Najwa Shihab perlu terus menjaga kredibilitas dan memperkuat kolaborasi dengan komunitas masyarakat sipil untuk memperluas dampak dari narasi yang mereka bangun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai ruang publik digital yang dapat mendorong diskursus politik yang inklusif. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada sinergi antara mobilisasi digital, tindakan nyata, dan upaya untuk mengatasi tantangan seperti polarisasi opini dan disinformasi. Untuk masa depan, penelitian lanjutan yang menghubungkan mobilisasi digital dengan dampaknya terhadap perubahan kebijakan struktural akan sangat penting dalam memahami peran media sosial dalam demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. O'G. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Revised and extended ed.). London: Verso.
- Atkinson, J. D. (2010). *Alternative media and politics of resistance: A communication perspective* (Vol. 16). Peter Lang.
- Bagdikian, B. H. (2004). *The New Media Monopoly*. Boston: Beacon Press.
- Baker, C. (2006). *Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters*. Cambridge University Press, Amerika Serikat.
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford University Press.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Curran, J., & Seaton, J. (2018). *Power without responsibility: Press, broadcasting and the internet in Britain*. London: Routledge.
- Dimitrova, D. V. (Ed.). (2021). *Global Journalism: Understanding world media systems*. Rowman & Littlefield.
- Fischer, E., & Reuber, A. R. (2011). Social interaction via new social media: (How) can interactions on Twitter affect effectual thinking and behavior? *Journal of Business Venturing*, 26(1), 1–18.
- Fu, W. W., Teo, J., & Seng, S. (2012). The bandwagon effect on participation in and use of a social networking site. *First Monday*, 17(5). <https://doi.org/10.5210/fm.v17i5.3971/>

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.
- Habermas, J., & Press, P. (1989). *The public sphere: An inquiry into a category of Bourgeois society*.
- Halpern, D., & Gibbs, J. (2013). Social media as a catalyst for online deliberation? Exploring the affordances of Facebook and YouTube for political expression. *Computers in Human Behavior*, 29(3), 1159–1168.
- Han, R. (2024). How social media use affects internal political efficacy in China: The mediating effects of social network interaction. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–6.
- Hardy, J. (2014). *Critical political economy of the media: An introduction*. Routledge.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave?: Digital media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Jenkins, Henry. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Kompas.com. (2024, 22 Agustus). Alert! Peringatan Darurat Berlogo Garuda Biru, Apa Artinya? (Video). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=22x5OS4MKcU>.
- Lim, M. (2018). Roots, routes, routers: Communications and media of contemporary social movements. *Journalism & Communication Monographs*, 20(2), 92–164.
- Liputan6.com. (2024, 22 Agustus). Maksud Peringatan Darurat Garuda Biru Indonesia Lagi Viral di Media Sosial. Diakses 25 November 2024 dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5680733/maksud-peringatan-darurat-garuda-biru-indonesia-lagi-viral-di-media-sosial>.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2008). *New media: A critical introduction*. Routledge.
- McChesney, R. W. (2008). *The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas*. New York: Monthly Review Press.
- McChesney, R. W. (2015). *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. New York: The New Press.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication*. London: Routledge.
- Noelle-Neumann, E. (1991). The theory of public opinion: The concept of the spiral of silence. *Annals of the International Communication Association*, 14(1), 256-287.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- Olaniyan, A., & Akpojivi, U. (2021). Transforming communication, social media, counter-hegemony and the struggle for the soul of Nigeria. *Information, Communication & Society*, 24(3), 422-437.
- Papacharissi, Z. (2010). *A private sphere: Democracy in a digital age*. Polity.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think*. Penguin.
- Parmelee, J. H., & Bichard, S. L. (2011). *Politics and the Twitter revolution: How tweets influence the relationship between political leaders and the public*. Lexington Books.
- Rogers, T., Goldstein, N. J., & Fox, C. R. (2018). Social mobilization. *Annual Review of Psychology*, 69(1), 357-381.
- Tapsell, R. (2019). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Marjin Kiri Publisher.
- Telaumbanua, R. (2024). Dinasti Politik dan Kualitas Demokrasi di Pemerintahan Daerah Indonesia: “Evaluasi dan Perspektif.” *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 9(2), 55-67.
- Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature* (March 19, 2018).
- Umar, A. R. M., Darmawan, A. B., Sufa, F. S., & Ndadari, G. L. (2014). Media sosial dan revolusi politik: Memahami kembali fenomena “Arab Spring” dalam perspektif ruang publik transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 114–129.
- Volkmer, I. (2014). *The global public sphere: Public communication in the age of reflective interdependence*. John Wiley & Sons.
- Sunardi, J. A., & Mustofa, A. (2021). Stereotypical Image of Chinese People in Hollywood’s *The Karate Kid 2010* Movie. *Wanastra: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 13(2), 131–138. <https://doi.org/10.31294/w.v13i2.10929>
- Surahman, S. (2015). Representasi Feminisme Dalam Film Indonesia (Analisis Semiotika Terkait Feminisme Pada Film *7 Hati 7 Cinta 7 Wanita*). *Jurnal Liski*, 1(2), 119–145. Retrieved from <http://journals.telkomuniversity.ac.id/liski/article/view/818/608>
- Sutorini, M. P., Alif, M., & Sarwani, S. (2019). Semiotika Gender dalam Film *Brave*. *ProTVF*, 3(1), 101. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.21246>
- Vera, N. (2014). *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Bogor, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Yoon, J. pil. (2017). Reconfiguring Orientalism: Japan and Korea as Depicted by Early Twentieth-Century French Orientalist Literature. *Interventions*, 19(8), 1132–1152. <https://doi.org/10.1080/1369801X.2017.1348245>

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Zayyana, S. H. (2021). Analisis Semiotika Ketimpangan Gender Dalam Film “Uang Panai Maha(R)L.” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 5(2), 173–186. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3980>

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April-June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id